BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara, antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut sebagai *high politics.*

Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya, seperti misalnya, perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga), atau pertukaran budaya (*culture exchange*). Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional *bipolar* dan berubah menjadi *multipolar* atau secara khusus mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia ini. Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara AS dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih fokus kepada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (misalnya, hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu *high politics.*

Hubungan antara NAFTA dan negara anggotanya, yaitu AS, Canada dan Meksiko merupakan salah satu contoh dari sekian banyak fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional, aktor hubungan internasional bisa saja merupakan merupakan *state actor* atau juga aktor *non state actor*, seperti yang diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional:

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi *non*-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu" (Perwita dan Yani 2005: 4).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam negara internasional itu sendiri. Hubungan-hubungan atau interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar dalam hubungan internasional, hal ini dapat dipertegas dengan melihat definisi dari hubungan internasional, yakni hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan, baik adanya campur tangan oleh pihak pemerintah ataupun tidak.

Perubahan pada aktor Hubungan Internasional diindikasikan dengan perubahan (bertambah atau berkurangnya) jumlah dan sifat aktor Hubungan Internasional. Disamping terjadinya penambahan aktor (negara) terjadi pula penambahan secara signifikan pada jumlah aktor non-negara (non state actors) seperti *Multi National Corporations* (MNCs), *International Govermental Organizations* (IGOs), *International non Govermental Organizations* (INGOs)

dan bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok teroris internasional dan *Transnational Organized Crime* (TOC).

Studi hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antar negara. Setiap negara memiliki motivasi dan prioritas tertentu yang ingin dicapai melalui hubungan dan interaksi dengan negara-negara lain, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat dari ahli atau pakar Hubungan Internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Trygive Mathisen terjemahan Suwardi Wiraatmadja dalam bukunya yang berjudul "*Methodology in the Study of International Relations*", bahwa: Hubungan international mempunyai arti "Semua aspek Internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti semua negara dan mempengaruhi tingkah laku yang terjadi atau berasal disuatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain".

Hubungan Internasional yang kini makin banyak diterapkan Negara – negara di dunia demi mencapai *nation interest* adalah melalui kerjasama regional. Sedangkan aktor dari hubungan internasional itu sendiri bisa saja merupakan *state actor* atau juga aktor *non state actor*.

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Terdapat alasan kuat yang diutarakan *Sorensen* mengapa kita sebaiknya mempelajari Hubungan Internasional.

> "adanya fakta bahwa seluruh penduduk duniaterbagi dalam komunitas politik yang terpisah, atau Negara – Negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama – sama Negara – Negara tersebut membentuk system internasional yang akhirnya menjadi system global" (Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005:2).

McClelland dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional juga berpendapat bahwa:

> "Hubungan Internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia" (Perwita & Yani, 2005:4).

Karena hal-hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

Jackson dan Sorensen juga mengatakan bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi - organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson dan Sorensen, 2005:34).

Dalam interaksi tersebut sering timbul berbagai masalah, oleh karena itu maka hubungan internasional perlu untuk dipahami dan dipecahkan dalam bentuk

studi. Studi hubungan internasional itu sendiri dengan demikian merupakan suatu studi tentang interaksi yang terjadi diantara negara-negara berdaulat di dunia atau merupakan studi tentang para pelaku bukan negara atau *non-state* aktor yang perilakunya mempunyai pengaruh dalam kehidupan negara berbangsa.

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Hubungan-hubungan atau interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar dalam hubungan internasional, hal ini dapat dipertegas dengan melihat definisi dari hubungan internasional, yakni hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan, baik disponsori pemerintah maupun tidak.

Dengan adanya berbagai interaksi dalam dunia internasional membuat negara harus saling berlomba dan berpartisipasi dalam dunia internasional. Hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi berbagai aktor yang berpartisipasi di dalam poltik internasional termasuk negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, entinitas subnasional seperti birokrasi, pemerintah lokal dan individu.

Hubungan atau interaksi antara aktor-aktor internasional itu menghasilkan fenomena-fenomena yang bervariasi dan dapat berwujud perjanjian internasional, hubungan diplomatik. Interaksi antar negara itu dalam sistem internasional sangat beragam, dan sering diklasifikasikan dalam lingkup berbagai masalah spesifik seperti perdagangan, perdamaian, kolonialisme. Pada dasarnya dalam karakteristik interaksi internasional dapat berupa kerjasama, persaingan, pertentangan atau

pertikaian. Suatu pertikaian dapat diselesaikan untuk sementara waktu dan hal ini disebut akomodasi, yang dapat dianggap sebagai bentuk dalam interaksi internasional.

Hubungan Internasional berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainya di antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non negara. Hubungan Internasional juga mengkaji tentang politik internasional walaupun istilah-istilah seperti Hubungan Internasional, politik dunia (*world politics*) dan politik internasional memiliki arti yang sama (*sinonim*).

Hubungan internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi kompleks. Kompleksitas hubungan internasional itu sesuai dengan pendapat Jack Plano yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan.

2.2 Organisasi Internasional

2.2.1 Pengertian Organisasi Internasional

Salah satu aktor dalam Hubungan Internasional adalah Organisasi Internasional. Pada awalnya Organisasi Internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks

hubungan internasional. Awalnya organisasi internasional terjadi ketika terbentuk kesepakatan pertama antara satuan-satuan politik yang otonom untuk menegaskan hak dan kewajiban bersama demi kerjasama dan perdamaian. Organisasi internasional tidak pernah dibentuk untuk saling memerangi atau saling memusuhi antar anggota.

Organisasi internasional merupakan sebuah "lembaga" yang berfungsi untuk menghubungkan urusan (*business*) diantara negara-negara. Keberadaan organisasi internasional di dalam sistem internasional tidak dimaksudkan untuk menggantikan peranan dan kewenangan negara bangsa dalam melaksanakan kebijaksanaan domestik maupun eksternal, hal yang bertolak belakang dengan organisasi supranasional.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional yang berarti aktivitas-aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational* (Perwita dan Yani, 2005 ; 92).

Sedangkan Pengertian organisasi internasional menurut Michael Hass dalam Perwita dan Yani, memiliki dua pengertian yaitu:

> "Pertama, organisasi internasional sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini" (Hass, 2005:93).

T.May Rudi mendefinisikan organisasi internasional dengan lebih jelas yaitu:

> “Pola kerjasama yang melintasi batas – batas Negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesame kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda” (May, T.Rudi: 2005, 29).

Menurut pengertian diatas, organisasi internasional mencakup 3 unsur, yaitu:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
3. Adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional”.

Perkembangan pesat dalam bentuk pola kerjasama melalui organisasi internasional, telah makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui eksistensi organisasi-organisasi internasional non pemerintah yang maikin hari makin banyak jumlahnya.

Tujuan dari organisasi internasional adalah mengkoordisasikan kegiatan-kegiatan. Sedangkan metode organisasi internasional adalah untuk melangsungkan koordinasi secara rutin dengan teknik seperti pembagian tugas dan tugas khusus. Koordinasi dapat dijalankan secara formal yang berlangsung dalam struktur resmi dan aparat lembaga, maupun secara informal yang melibatkan sistem praktek yang tidak tertulis dimana unit-unit dalam sistem mempunyai peranan yang berbeda seperti peranan sebagai pemimpin, atau yang

dipimpin. Jadi dalam arti yang kedua ini, organisasi internasional mengacu kearah pembedaan peran informasi dalam lingkup politik dunia.

2.2.2 Penggolongan Organisasi Internasional

Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah (*inter-governmental organization/*IGO), yang anggotanya terditi dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.
2. Organisasi non-pemerintah (*Nongovernmental organization/*NGO*)*, terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005:93-94).

IGO dan NGO kemudian dibagi lagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi pertama adalah tujuan organisasi (secara umum dan khusus) dan dimensi kedua adalah keanggotaan (secara terbatas dan universal).

Bennet menjelaskan bahwa karakteristik umum yang terdapat dalam kedua jenis lembaga internasional tersebut meliputi : organisasi permanen untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu; keanggotaannya bersifat sukarela; instrumen dasar yang menyatakan tujuannya, struktur, dan metode pelaksanaannya; badan konsultatif yang refresentatif; sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif, penelitian dan informasi (Perwita dan Yani, 2005: 94).

2.2.3 Peran Organisasi Internasional

Peranan dapat dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi didalam suatu sistem. Suatu organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah dianggap menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian peranan dapat dianggap sebagai fungsi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara, kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut (Prawita dan Yani, 2005: 95).

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial (Prawita dan Yani, 2005: 31).

Setiap organisasi internasional memiliki fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan tujuan organisasi internasional tersebut di bentuk. Peran organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen (alat pencapaian tujuan). Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk pencapaian tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Suatu instrumen menunjukkan tujuannya apabila memperlihatkan kegunaannya dalam periode tertentu biasanya terjadi pada *Intergovernmental Organizations* (IGOs), dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Sedangkan, pada *Nongovernmental Organizations* (INGOs) tindakannya mencermikan perilaku dari anggotanya yang berupa kelompok perdagangan, organisasi bisnis, partai politik, atau kelompok gereja.
2. Sebagai arena (perumusan suatu masalah). Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas msalah-masalah yang dihadapi. Dalam hal ini organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi para anggota untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi, berdebat, bekerjasama, maupun saling berbeda pendapat. Organisasi internasional menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan serta usul dalam suatu forum politik dimana hal seperti ini tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral.

3. Sebagai aktor independen (pembuat keputusan). Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Sejak tahun 1960-an terdapat bukti-bukti bahwa sejumlah entitas termasuk organisasi internasional dapat mempengaruhi kejadian-kejadian dunia. Bila hal ini terjadi, entitas-entitas tersebut menjadi aktor dalam arena internasional dan saingan bagi negara. Kemampuan entitas tersebut dalam beroperasi sebagai aktor internasional dan transnasional dapat dibuktikan karena mengidentifikasi diri dan kepentingannya melalui badan-badan koorporasi, bukan melalui negara. (Prawita dan Yani, 2005: 95-97).

Sedangkan menurut Acher, organisasi internasional mempunyai tiga peran penting dalam *world politic*. Pertama, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara sebagai instrumen dari kebijakan luar negerinya dimana hal ini sesuai dengan pandangan *state centric*. Kedua, organisasi internasional dimanfaatkan untuk memodifikasi atau mengatur tingkah laku negara-negara. Ketiga, organisasi internasional adalah sebagai aktor yang dapat bertindak sesuai dengan kemauannya, sehingga dapat dilihat apakah organisasi internasional tersebut otonom atau tidak (Rudy, 2005: 29).

Organisasi internasional dibentuk dengan berbagai fungsi peranannya agar dapat mencapai tujuan dengan baik. Peran dan fungsi Organisasi internasional sendiri diartikan berbeda antara peranan dan fungsi organisasi internasional, peranan organisasi internasional, yaitu :

1. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan.
2. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama – sama atau perumusan perjanjian – perjanjian internasional
3. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bias merupakan actor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota – anggotanya.

Sementara itu T.May Rudi dalam bukunya *Administrasi & Organisasi Internasional* berpendapat mengenai peran organisasi internasional ada tiga point, yaitu :

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik sesame anggota.
2. Sebagai sarana untuk peundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan

Sedangkan menurut fungsi organisasi internasional adalah :

Tempat berhimpun bagi Negara – Negara anggota bila itu organisasi pemerintah dan bagi kelompok bila itu organisasi non-pemerintah.

1. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama dan memprakarsai berlangsungnya perundigan untuk menghasilkan perjanjian – perjanjian internasional

2. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma internasional
3. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara sesame anggota dan adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota

Penyebarluasan informasi yang bias dimanfaatkan sesama anggota. (T. May Rudi: 2005, 25).

Melihat dari itu semua organisasi Internasional juga memiliki perannya masing – masing. Menurut funfsinya, Organisasi Internasional dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu :

1. Organisasi Politikal, yaitu organisasi yan dalam kegiatannya menyangkut masalah – masalah politik dalam hubungan Internasional. Adalah merupakan organisasi yang bersifat politik jika ada sangkut paut dengan masalah perdamaian dan keamanan.
2. Organisasi Administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melakukan kegiatan teknis secara administrative.
3. Organisasi Peradilan, yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek menurut prosedur hokum dan melalui proses peradilan. (May, T.Rudi : 2005, 29)

2.2.4 Fungsi Organisasi Internasional

Menurut Bennt fungsi dari organisasi internasional adalah :

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan (Prawita dan Yani, 2005: 97).

Sementara Acher menyebutkan organisasi internasional dalam fungsi sebagai instrumen, forum atau arena dan aktor mempengaruhi fungsi dari sistem politik internasional melalui fungsi-fungsi, yaitu sebagai: artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggotanya; menghasilkan norma-norma (*rezim*); rekrutmen; sosialisasi; pembuat peraturan (*rule making*); penerapan peraturan (*rule application*); penilaian atau penyelarasan keputusan (*rule adjuction*); tempat memperoleh informasi; dan operasionalisasi (Rudy, 2005: 29).

Fungsi sebagai artikulasi dan agregasi, organisasi internasional berfungsi untuk melakukan tugas artikulasi dan agregasi kepentingan dalam hubungan internasional dengan menjadi instrumen untuk artikulasi dan agregasi kepentingan, menjadi forum mengartikulasikan kepantingan, dan mengartikulasikan kepentinga yang terpisah dalam beroperasinya organisasi internasional sebagai forum bagi diskusi dan negosiasi.

Organisasi internasional sebagai instrumen, forum dan aktor telah memberi kontribusi yang berarti bagi aktivitas normatif dari sistem politik internasional.

2.3 Ekonomi Politik Internasional

Jika dilihat dari dimensi globalisasi Thomas I Friedman liberalisasi perdagangan termasuk dalam globalisasi atau dampak dari era globalisasi tersebut. Liberalisasi perdaganagn dapat diartikan sebagai suatu perdagangan dimana barang – barang dapat diimpor dan diekspor tanpa adanya halangan baik dalam bentuk tarif, kota, maupun pelbagai halangan lainnya (Juliantono,2007:35-36).

Liberalisasi perdagangan merupakan penerjemahan liberalisme, khususnya liberalisme ekonomi, disektor perdagangan adalah pandangan David Ricardo mengenai "keunggulan komparatif". Menurut teori tersebut, suatu negara dapat meraih kesejahteraan bersama melalui perdagangan apabila mengkhususkan perekonomiannya untuk memproduksi dan mengekspor barang – barang yang paling efisien atau memiliki kerugian absolut yang lebih kecil dan mengimpor barang – barang yang memiliki kerugian absolut yang paling besar bagi negaranya (Todaro, didalam Julianto, 2007:36).

Dengan kata lain ekonomi internasional merupakan ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara – negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ekonomi internasional mencakup masalah ekonomi dalam hubungannya satu negara dengan negara lain, baik mikro maupun makro . Aspek makro ekonomi meliputi kekuatan-kekuatan yang secara internasional mempengaruhi penghasilan nasional dan kesempatan kerja antara beberapa perekonomian sedangkan aspek mikro ekonomi meliputi alokasi faktor – faktor produksi, penentuan harga dan

menyangkut masalah jual beli secara internasional. Pengertian lain dari ekonomi politik internasional adalah :

> "Ekonomi politik internasional menerobos batasan-batasan yang memisahkan dan mengisolasi metode analisis tradisional untuk mencari pengertian komprehensif dari isu-isu dan kejadian-kejadian di dunia internasional yang menggabungkan pemikiran dalam bidang ekonomi internasional dan politik internasional" (Perwita dan Yani, 2006: 77).

Ekonomi pasar tidak bisa lepas dari aturan politik itu merupakan keniscayaan, Robert Jackson dan Georg Sorensen memandang ekonomi politik internasional pada dasarnya membahas tentang siapa mendapatkan apa dalam sistem eknomi dan politik internasdional (Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005:2).

Sehingga secara empirik, tingkat saling ketergantungan dalam masyarakat internasional yang semakin tinggi sebagai akibat proses transnasionalisme dalam ekonomi yang melewati batas negara seperti peningkatan perdagangan, proses globalisasi dan terciptanya kelompok ekonomi regional telah menjadikan suatu kondisi dimana tidak ada lagi suatu kebijakan ekonomi politik nasional yang bersifat domestik (Perwita dan Yani, 2005: 77).

Berdasarkan teori perdagangan internasional, ada dua jenis hambatan yaitu:

1. Hambatan Tarif

   Tarif adalah pembebanan pajak atau *custom duties* terhadap barang – barang yang melewati batas negara. Pajak yang dikenakan terhadap produk impor yang masuk kewilayah pabean suatu negara disebut tarif impor. Sedangkan pajak yang dikenakan terhadap produk yang diekspor disebut tarif ekspor.

2. Hambatan non tarif

   Hambatan non tarif ini dapat dirinci lagi menjadi:

   a. Hambatan kuantitatif, yaitu kuota, kuota adalah alokasi jumlah maksimal barang tertentu yang boleh diimpor (*kuota impor*) atau yang boleh diekspor (*kuota ekspor*)
   b. Hambatan administratif, pada hakikatnya prosedur administrtatif terhadap produk impor berakibat sama seperti halnya hambatan tarif maupun kuota, yaitu bahwa produk impor sulit masuk kewillyah pabean suatu negara yang menerapkan prosedur administrasi tersebut.
   c. Persyaratan kandungan lokal, artinya ketentuan hukum yang mewajibkan agar suatu produk yang diproduksi didalam negeri harus menggunakan komponen asli buatan lokal dengan jumlah minimal tertentu.

2.4 Hubungan Internasional Kawasan

Definisi dari regionalisme atau kawasan sangat beragam, menurut Mansbaach yang disebut *regionalism* adalah "Pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi Internasional" (Nuraeni, Deasy dan Arfin : 2010, 1).

Dalam memahami regionalism setidaknya ada empat cara atau criteria seperti yang dikemukakan Columbis dan Wolf dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Relations, Power and Justice* yaitu:

1. Kriteria Geografis: mengelompokan Negara dengan berdasarkan lokasinya dalam benua, sub – benua, kepulauan dan lain sebagainya.
2. Kriteria Politik: mengelompokan Negara dengan berdasarkan pada keikusertaanya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik.
3. Kriteria Ekonomi: mengelompokkan Negara – Negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi.
4. Kriteria Transaksional: mengelompokan Negara dengan berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa.

Kemudian Andre H.Pareira dalam bukunya berjudul perubahan global dan perkembangan studi hubungan internasional mengutip ungkapan Bruce Russet tentang criteria suatu kawasan:

1. Adanya kemiripan sosiokultural
2. Sikap politik atau perilaku eksternal yang mirip
3. Keanggotaan yang sama dalam organisasi – organisasi supranasional atau antarpemerintah
4. Interdependensi ekonomi, yang diukur dengan criteria perdagangan sebagai proporsi pendapatan nasional
5. Kedekatan geografik, yang diukur dengan jarak terbang antara ibukota Negara tersebut (Nuraeni, Deasy dan Arfin : 2010, 2).

2.5 Kerjasama Internasional

Hubungan yang jelas terlihat antara konflik dan kerjasama internasional, dimana konflik yang ada dapat diakomodasikan melalui negosiasi. Konflik potensial tersebut selallu berakhir melalui tingkatan kerjasama. Jadi, hubungan kerjasama selalui menjadi pilihan yang tidak pernah ditinggalkan oleh akto-aktor hubungan internasional. Hukum internasional, organisasi internasional, hubungan ekonomi dan diplomasi adalah empat metode negara untuk selalu berusaha mengkordinasikan hubungannya secara konstruktif. Negara-negara menggunakan keempat hal tersebut untuk meningkatkan dan memfasilitasi inter-relasi politik dan ekonomi mereka. Selain itu mereka juga menggunakannya untuk mengontrol konflik dan meningkatkan kerjasama kearah yang lebih baik lagi.

Kerjasama internasional dilaksanakan guna meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk meningkatkan hubungan bilateral antara negara-negara maka perlunya suatu kerjasama internasional yang baik dan adanya saling pengertian dan dalam konstelansi hubungan internasional dewasa ini merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kedaulatan dan hak-hak negara lain.

Kerjasama internasional mengandung satu interaksi, inter-relasi dan interdependensi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dari suatu kesatuan unit dalam sistem internasional dan masyarat internasional. Kerjasama internasional dapat dijalankan dalam berbagai bentuk organisasi internasional, walaupun negara tetap menjadi aktor yang dominan di

dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional non-pemerintah yang semakin hari makin banyak jumlahnya (Rudy, 2005:3).

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, politik, ekonomi, sosial, lingkungan, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005:34).

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama, dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Perwita dan Yani, 2005:34).

Menurut Muhamadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan dari interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat didalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi

> internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006: 6).

Kerjasama menjadi *low politics* yang lebih menyoroti isu-isu non-keamanan. Kerjasama internasional sendiri merupakan proses utama dan interaksi internasional. Kerjasama internasional pada hakekatnya dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu :

1. Kerjasama multilateral

   Hakekat dan kerjasama internasional yang universal (global) adalah memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari konflik internasional.

2. Kerjasama regional

   Merupakan kerjasama antar negara yang berdekatan secara geografis, kerjasama jenis ini merupakan gagasan yang mulai dikenal pada awal abad ke 19.

3. Kerjasama Fungsional

   Dalam kerjasama fungsional, negara-negara terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu, sehingga kerjasama tersebut akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara.

4. Kerjasama ideologi

Kerjasama ini merupakan alat dari suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dari perjuangan kekuasaannya.

Ada tiga motif dalam melakukan kerjasama internasional, yaitu :

1. Meningkatkan kepentingan nasional
2. Memelihara perdamaian
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Konsep kerjasama yang dipakai disini adalah kerjasama yang sifatnya internasional. Ada dua jenis interaksi dalam dunia internasional, yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama internasional dapat diselenggarakan berkat adanya kesamaan visi dan keselarasan kepentingan dimana aktor-aktor yang berinteraksi. Melalui kerjasama internasional, suatu pihak mengharapkan kepentingannya akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri.

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara akto-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional yang paling kuat). Kerjasama demikian akan terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua pihak yang bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.

Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional, yaitu:

1. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang terlibat hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang seklai terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat. (Smith dan Hocking, 1990: 22).

2.6 Konsep Pengaruh

Regulasi Chapter 7 yang dikeluarkan oleh NAFTA tentang pertanian memberikan pengaruh yang penting terhadap keadaan pertanian di Meksiko baik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Meksiko maupun terhadap perdagangan produk pertanian Meksiko, Menurut Holsti dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* karangan Perwita dan Yani konsep pengaruh didefinisikan sebagai:

> "Kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan" (Perwita dan Yani: 2005, 31).

Daniel S. Paap memaparkan bahwa pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan *outcomes* (Perwita dan Yani, 2005: 31).

Perwita dan Yani juga menjelaskan lebih lanjut asumsi dasar konsep pengaruh, menurut Alvin Z. Rubenstein, yaitu:

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.
2. sebagai konsep multidimensi, konsep pengaruh lebih dapat diidentifikasikan daripada diukur oleh beberapa kebenaran (proposisi). Sejumlah konsep pengaruh dapat diidentifikasikan hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku B yang dapat mempengaruhi A terbatas.
3. Jika Pengaruh A terhadap B besar, akan mengancam sistem politik domestik B, termasuk sikap, perilaku domestik dan institusi B.
4. Pengetahuan yang dalam mengenai politik domestik B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijakan luar negeri antara A dan B dikarenakan pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam konteks isu area tertentu dari B.
5. pada saat seluruh pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi, terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak berpengaruh terhadap suatu negara atau pemimpin negara tersebut. Pemerintah B tidak akan memberikan konsesi-konsesi terhadap A yang dapat melemahkan

kekuatan politik domestik B, kecuali bila A menggunakan kekuatan militer terhadap B.

6. Negara donor berpengaruh terhadap negara-negara yang lain yang menerima bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya ada timbal balik dari B kepada A, akan tetapi juga reaksi C, D, E, F, dan seterusnya yang dapat berpengaruh terhadap hubungan A dan B.
7. Data-data yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh terdiri dari lima kategori, yaitu:
    a. Ukuran perubahan konsepsi dan tingkah laku.
    b. Ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung.
    c. Ukuran dari pengaruh yang ditujukan
    d. Studi kasus
    e. Faktor perilaku idiosinkratik.
8. Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variabel yang ada diantara negara-negara. Yang paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama. (Perwita dan Yani 2005: 31-33).

Lebih lanjut Rubenstein berpendapat bahwa pengaruh memiliki beberapa konsep, yaitu:

1. Hal yang dipengaruhi.
2. Perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri atau dalam negeri.
3. Asumsi, kriteria, dan data yang penting dalam menganalisis hal yang dipengaruhi dan perubahan dalam kebijakan dalam dan luar negeri.

Lingkungan eksternal dan internal memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya, dalam hal ini syaratnya adalah terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat antara sumber dengan hasil (Rubenstein, 1976:3-6).

Sedangkan salah satu pakar hubungan internasional K.J Holsti memberikan definisinya mengani konsep pengaruh beserta variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan pengaruh,

> "Pengaruh adalah perangkat untuk mencapai tujuan digunakan untuk mencapai atau mempertahankan tujuan, termasuk didalam tujuan adalah prestise, keutuhan wilayah, semangat nasional, bahan mentah, keamanan, atau persekutuan" (Holsti, 1987: 201-203).

Dari sisi sudut pandang negara, variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan pengaruh ialah:

1. Kapabilitas negara.
2. Persepsi terhadap pemakaian kapabilitas tersebut.
3. Kebutuhan antara dua negara dalam hubungan yang saling mempengaruhi.
4. Kualitas ketanggapan.
5. Pengorbanan dan komitmen (Holsti, 1987:209).

Sedangkan menurut T. May Rudy, "Pengaruh" sendiri dapat dianalisis dalam empat macam bentuk:

1. Pengaruh sebagai aspek kekuasaan, pada hakikatnya adalah saran untuk mencapai tujuan.
2. Pengaruh sebagai sumber daya yang digunakan dalam tindakan terhadap pihak lain, melalui cara-cara persuasif, sampai koersif dengan maksud mendesak untuk mengikuti kehendak yang memberikan pengaruh.
3. Pengaruh sebagai salah satu proses dalam rangka hubungan antara satu sama lain (individu, kelompok, organisasi, dan negara).
4. Besar-kecilnya pengaruh ditinjau secara relatif dengan membandingkan melalui segi kuantitas (besar-kecilnya keuntungan atau kerugian).

Dimana besar kecilnya kekuasaan sangat menentukan besar kecilnya suatu pengaruh, bentuk pengaruh ini dapat berupa:

1. Mengarahkan atau mengendalikan untuk melakukan sesuatu.
2. Mengarahkan atau mengendalikan untuk tidak melakukan sesuatu (Rudy, 1993:24-25).

Dari pemaparan tentang konsep pengaruh diatas, dapat ditarik pengertian bahwa aktor dapat mempengaruhi tingkah orang lain atau suatu negara dengan cara-cara yang dikehendaki oleh aktor tersebut untuk mencapai tujuannya. Pengaruh yang diberikan oleh aktor disini adalah regulasi NAFTA, merupakan cara untuk mempertahankan tujuan dari NAFTA. Jika dilihat dari NAFTA, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi internasional baik IGO maupun INGO memberikan pengaruh dan

keterikatan baga para anggotanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu juga dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh NAFTA untuk mengikat dan memberikan aturan yang jelas terhadap negara anggotanya memberikan pengaruh langsung terhadap masing-masing negara anggotanya.